

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Program Dana Hibah Mandek

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Galamedia / Hal.6

Edisi : Jumat, 14 September 2018

## Program Dana Hibah Mandek

### SIRNARAS, (GM).-

Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna sedang mencari solusi agar program dana hibah Rp 100 juta per RW tetap bisa berlangsung, dan anggaran terserap demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut dilontarkan Ajay menanggapi adanya keluhan dari forum ketua RW Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi terkait program tersebut.

"Memang sampai sekarang program itu agak mandek. Salah satunya karena keluhan tidak ada alokasi soal upah pekerja. Insya Allah kita sedang bicarakan hal itu untuk dicari jalan keluarnya," aku Ajay ditemui usai membuka kegiatan penyuluhan dalam menjaga kondusifitas di daerah menjelang Pileg dan Pilpres

tahun 2019 di Villa Neglasari Jalan Sirnarasa, Kota Cimahi, Kamis (13/9).

Mengenai solusi yang bakal diterapkan, lanjut Ajay, perlu ditelaah lebih lanjut. "Bisa dengan anggaran lain atau ganti regulasinya," katanya.

Menurut Ajay, program bantuan RW seharusnya menjadi agenda pemberdayaan masyarakat. "Tadinya ingin menumbuhkan warisan nenek moyang yang sudah mulai pudar yaitu gotong royong. Faktanya di lapangan memang seperti sekarang," ucapnya.

Meski demikian, Ajay memaklumi hal tersebut. "Memang hak mereka ketika sudah mengucurkan keringat untuk bekerja, ya perlu ada upah," katanya.

Ia bakal segera memutuskan soal solusi agar program bantuan RW cepat terserap. "Hampir

semua wilayah mengeluhkan hal itu dan minta agar ditindaklanjuti agar cepat terealisasi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, perwakilan forum ketua RW Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Sujadi, mengeluhkan program Wali Kota Cimahi terkait dana hibah Rp 100 juta per RW.

disebutkan Sujadi, dana hibah tersebut tidak akan cukup saat digunakan pembangunan fisik, karena dana Rp 100 juta itu tidak termasuk untuk ongkos pekerja ketika hendak digunakan perbaikan saluran air dan jalan.

Terlebih dalam program tersebut setiap RW totalnya hanya menerima Rp 72 juta karena sisanya harus digunakan untuk insentif yang lain. Insentif per bu-

lan tersebut diantaranya, Rw Rp 300 ribu, RT Rp 200 ribu, RW siaga Rp 100 ribu, posayandu Rp 100 ribu, posbindu Rp 100 ribu, PKK tingkat RW Rp 100 ribu dan insentif linmas tingkat RT Rp 100 ribu.

Sementara untuk fasilitas pembangunan seperti sarana prasarana (sparas) dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan anggarannya sebesar Rp 72.500.000, maka secara keseluruhan sebesar Rp 100.850.000.

"Jadi saya keberatan karena pekerja di kota berbeda dengan di kampung yang biasanya kerja bakti secara sukarela, dan tidak dibayar pun tidak masalah, tapi di kota masyarakatnya pada sibuk. Kalau tidak dikasih ongkos kerja kebutuhan keluarganya bagimana," kata Sujadi. Rabu (12/9). (B.110)\*\*